

LAPORAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun n dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yaitu Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan meningkatnya pengembangan industry kecil menengah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 19 Februari 2026
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	6
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	7
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	8
1. Kepegawaian	8
2. Sarana dan Prasarana	12
3. Anggaran (setelah perubahan)	13
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH	14
F. LANDASAN HUKUM	14
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)	17
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)	18
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	20
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	21
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)	25
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	26
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	27
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	30
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	32
D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	51
1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025	51
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	56
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	61
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;	62
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:	62
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	65
B. INOVASI TAHUN 2025	64
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025	70
BAB IV PENUTUP	73
A. SIMPULAN	73
B. RENCANA AKSI TAHUN 2026	76
LAMPIRAN	
A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD	
B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD	
C. Matriks Renja Tahun n dan Perubahannya	
D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun n dan perubahannya	
E. Pengukuran Kinerja	
F. Pohon Kinerja	
G. Rencana Aksi Tahun n+1	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2025 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2025 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Perindustrian dan perdagangan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan terdiri atas:

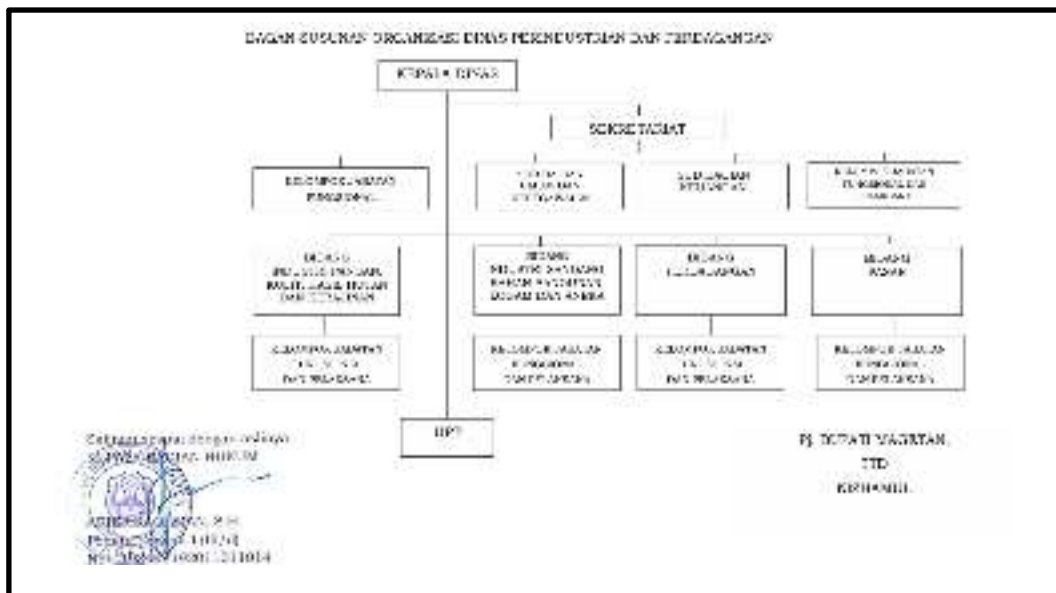
- a. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pasar, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdag

Berikut bagan susunan organisasi Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat....Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan didukung oleh pegawai sebanyak 167 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	0
II	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	0
1	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	-1
3	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
5	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
7	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
8	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
9	Operator Layanan Operasional	3	3	0
10	Pengelola Umum Operasional	8	0	-8
11	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	-1
13	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	-1
14	Pengolah Data Dan Informasi	2	0	-2
III	Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan	1	0	-1
1	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	1	-1
2	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	-4
IV	Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka	1	1	0
1	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	2	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	-1
V	Kepala Bidang Perdagangan	1	1	0
1	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	2	1	-1
2	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	0	-1
3	JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	0	-2
4	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
5	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
6	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
VI	Kepala Bidang Pasar	1	1	0
1	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	1	1	0
2	Penelaah Teknis Kebijakan	8	8	0
3	Pengolah Data Dan Informasi	9	0	-9
4	Pengelola Layanan Operasional	5	1	-4

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
5	Pengadministrasi Perkantoran	23	16	-7
6	Operator Layanan Operasional	115	93	-22
7	Operator Layanan Operasional	4	4	0
8	Pengelola Umum Operasional	8	8	0
VII	Jabatan Fungsional Tertentu			
1	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Madya	2	1	-1
2	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	1	0	-1
3	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama	7	4	-3
4	JF Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan/Mahir	1	1	0
5	JF Perencana Ahli Madya	1	0	-1
6	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	-2
7	JF Arsiparis Terampil	1	0	-1
8	JF Arsiparis Mahir	1	0	-1
9	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
10	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	-1
11	JF Analis Perdagangan Ahli Madya	1	0	-1
12	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	5	0	-5
13	JF Penera Ahli Muda	2	0	-2
14	JF Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1	0	-1
15	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	2	0	-2
	UPTD Metrologi Legal			
VIII	Kepala UPTD	1	1	0
1	JF Penera Ahli Pertama	3	3	0
2	JF Penera Penyelia	1	0	-1
3	JF Penera Mahir	2	0	-2
4	JF Penera Terampil	2	1	-1
5	JF Pengamat Tera Terampil	1	0	-1
6	JF Pengamat Tera Mahir	1	0	-1
7	JF Pengamat Tera Penyelia	1	0	-1

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
8	JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	0	-2
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
10	Pengelola Layanan Operasional	1	0	-1
11	Pengolah Data Dan Informasi	1	0	-1
12	Operator Layanan Operasional	1	1	0
	Jumlah	276	167	-109

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	4
5	Penata Tk.I/III-d	11
6	Penata/III-c	4
7	Penata Muda Tk.I/III-b	14
8	Penata Muda/III-a	17
9	Pengatur Tk.I/II-d	3
10	Pengatur/II-c	5
11	Pengatur Muda Tk.I/II-b	1
12	Pengatur Muda/IIa	2
13	V (PPPK)	9
14	PPPK Paruh Waktu	96
	Jumlah	167

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	10
3	Strata 1/Sederajad	30
4	Diploma 3	3
5	SMA/Sederajad	112
6	SMP/Sederajad	7
7	SD/Sederajad	5
	Jumlah	167

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	119
2	Perempuan	48
	Jumlah	167

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
per 31 Desember 2025
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	21.640.286.256	-	-	21.640.286.256
2.	Peralatan dan Mesin	8.391.954.270	103.139.675	21.065.000	8.474.028.945
3.	Gedung dan Bangunan	115.159.317.883	4.243.331.030	2.560.214.840	116.842.434.073
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.500.000	-	-	7.500.000
5.	Aset Tetap Lainnya	6.660.000	-	-	6.660.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.370.000	705.377.900	74.370.000	705.377.900
	Jumlah	145.280.088.409	5.051.848.605	2.655.649.840	147.676.287.174

3. Anggaran (setelah perubahan)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 21.023.549.418 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2025 dan 2026
(Sebelum Penyusutan)

Kode Rekening	Program	Tahun 2025	Tahun 2026
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7,685,800,951.00	10,368,678,300.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	162,508,350.00	52,696,800.00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6,719,349,701.00	9,543,956,250.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	309,724,250.00	271,539,700.00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	91,019,500.00	43,260,000.00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	106,881,850.00	121,875,000.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	296,317,300.00	335,350,550.00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13,337,748,467.00	13,337,748,467.00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,794,235,657.00	11,037,585,254.31
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,342,302,360.00	892,070,850.00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	48,260,200.00	36,195,300.00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	152,950,250.00	128,855,550.00
J U M L A H	J U M L A H	21,023,549,418.00	22,463,385,254.31

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sesuai tugas dan fungsinya tahun 2025 adalah:

1. Optimalisasi pemasaran produk IKM melalui pemanfaatan media sosial;
2. Penataan lokasi berdagang bagi PKL agar tertib, aman, dan sesuai peruntukan; dan
3. Penataan, revitalisasi, dan peningkatan infrastruktur pasar daerah menuju pasar sehat dan ber-SNI

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029; dan
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/320/kept./403.013/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 (Berdasarkan RPD 2024-2026)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengalami masa transisi dengan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan Bupati Magetan, Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan
Tujuan RPD Tahun 2024-2026

Tujuan ke-1 RPD: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran ke-.1 RPD: .Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan Indikator : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
Tujuan Renstra: Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah Indikator PDRB Sektor Perdagangan Indikator PDRB Sektor Industri
Sasaran Renstra: 1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah 3. Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikator Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026 (berdasarkan Renstra RPD)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 2(Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA			
					2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah		PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	2,527,602,65	2,637,306,77	2,747,010,89	
			PDRB sector Industri	Juta Rupiah	919.090,12	962.770,45	1.006.450,78	
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Persentase	7,15	7,16	7,17
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase	0,200	0,201	0,202
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan	Nilai SAKIP	Angka	84,78	84,79	84,8

		Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	79.75	79,9	80
--	--	---	----------------------------	------	-------	------	----

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 2024 - 2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

TUJUAN : Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat			
SASARAN ke- 2 : Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
			Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
		Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
		Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
		Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
			Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM

			Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meminimalkan kesenjangan antara tingkat layanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan harapan dan keinginan stakeholder	Meningkatkan Kualitas SDM
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
 tahun 2024-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan usaha perdagangan	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$ Definisi Operasional: Jumlah usaha perdagangan adalah banyaknya unit usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang/jasa di suatu wilayah tertentu, baik skala besar maupun kecil, formal maupun informal, dalam kurun waktu tertentu.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Bidang Perdagangan ● Bidang Pasar ● Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$ Definisi Operasional:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan ● Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

			Jumlah Total Industri adalah jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah yang terdaftar di wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.		<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya 	Inspektorat Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekretariat ● Bidang Perdagangan ● Bidang Pasar ● UPTD Metrologi Legal ● Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan ● Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

			<p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKJIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
		<p>Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Jumlah Indeks per Parameter</p> <p>Nilai IKM : ----- x 25</p> <p>Jumlah Parameter</p> <p>9 Unsur/parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana 	<p>Laporan hasil IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekretariat ● Bidang Perdagangan ● Bidang Pasar ● UPTD Metrologi Legal ● Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan ● Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magedan. Tahun 2024-2026

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi
Bupati Magetan
Tahun 2025-2029

Visi (RPJMD): Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan
Misi (RPJMD) ke- 2 Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk Menetapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
Tujuan (RPJMD) ke- 2 Berkembangnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Indikator: Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran (RPJMD) ke- 2 Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Daerah Indikator: Indeks Infrastruktur
Tujuan (Renstra) ke- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan meningkatinya pengembangan industry kecil menengah Indikator: PDRB Sektor Perdagangan Indikator: PDRB Sektor Industri
Sasaran (Renstra) ke- 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan Indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan Sasaran (Renstra) ke- 2 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Indikator: Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Sasaran (Renstra) ke- 3 Meningkatnya kepuasan layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Indikator 1 : Nilai SAKIP

Indikator 2 : Indeks kepuasan masyarakat

1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 1 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA					
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah		PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	2,637,306,77	2,747,010,89	2.838.317.76	2937658882	3040476942	
			PDRB sector Industri	Juta Rupiah	962.770,45	1.006.450,78	1.976.472,25	2.025.884,06	2.076.531,16	
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Persentase	7,16	7,17	7,18	7,19	7,20
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase	0,201	0,202	0,203	0,204	0,205
		1.3		Nilai SAKIP	Angka	84,79	84,80	84,81	84,82	84,83

		Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	79,9	80	80,10	80,20	80,30
--	--	--	----------------------------	------	------	----	-------	-------	-------

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 2025 - 2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.7
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025 - 2029

VISI : Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan			
MISI ke- 2 : Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk Menetapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional	Revitalisasi pasar daerah sesuai SNI, peningkatan kualitas manajemen pengelola pasar, dan digitalisasi layanan pasar rakyat.
			Penguatan sistem registrasi dan pelaporan gudang berbasis online serta pemantauan distribusi barang.
			Penyederhanaan layanan pendaftaran waralaba dan penguatan pembinaan terhadap pelaku usaha waralaba lokal.
			Penerapan sistem perizinan ketat dan pengawasan distribusi minuman beralkohol sesuai regulasi daerah.
			Intensifikasi pengawasan bahan berbahaya, pelabelan sesuai standar, serta kampanye kesadaran konsumen.

		Peningkatan koordinasi pengawasan perdagangan kayu, pelaporan digital, dan kepatuhan aturan kehutanan.
		Fasilitasi percepatan layanan SKA berbasis elektronik (e-SKA) untuk mendukung peningkatan ekspor daerah.
		Peningkatan infrastruktur distribusi (gudang, pasar induk, depo logistik) dan integrasi dengan sistem rantai pasok nasional.
		Pelatihan manajemen distribusi berbasis digital dan peningkatan kelembagaan pengelola distribusi.
		Optimalisasi monitoring stok & distribusi barang pokok melalui Sistem Informasi Harga dan Barang Penting.
		Penguatan dashboard pemantauan harga berbasis real time di pasar tradisional dan modern.
		Rutin melaksanakan operasi pasar, bazar murah, dan subsidi ongkos distribusi pada masa krisis harga.
		Digitalisasi distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi melalui sistem kartu tani
		Fasilitasi pameran dagang, dan marketplace digital untuk produk unggulan daerah.
		Branding produk ekspor unggulan daerah dengan promosi terpadu lintas kabupaten/kota dan internasional.
		Modernisasi peralatan metrologi legal, peningkatan intensitas sidak, dan penguatan peran UPT Metrologi.
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang berorientasi pada hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan.
		Penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan industri secara online, serta fasilitasi sertifikasi produk (SNI, halal, PIRT).
		Optimalisasi pendampingan proses izin usaha industri kecil dan menengah melalui layanan terpadu digital.
		Memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan izin sesuai zonasi industri serta mempercepat penerbitan izin berbasis online
		Pengawasan Perizinan Sektor Industri melalui pencatatan, pengawasan, dan sebagai prasyarat fasilitas lainnya bagi IKM

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
tahun 2025-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan usaha perdagangan	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional:</p> <p>Jumlah usaha perdagangan adalah banyaknya unit usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang/jasa di suatu wilayah tertentu, baik skala besar maupun kecil, formal maupun informal, dalam kurun waktu tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perdagangan • Bidang Pasar 	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional:</p> <p>Jumlah Total Industri adalah jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah yang terdaftar di wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan • Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka 	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 	Inspektorat Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

			<p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKJIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKJIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
		Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>Jumlah Indeks per Parameter</p> <p>Nilai IKM : ----- x 25</p> <p>Jumlah Parameter</p> <p>9 Unsur/parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelavanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana 	Laporan hasil IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025:

Tabel 2.9
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah			PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	2,637,306,77
				PDRB sector Industri	Juta Rupiah	962.770,45
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Persentase	7,16
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase	0,201
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	Angka	84,79
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	79,9

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan:

Tabel 2.10
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.597.506.891
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	%	75	<i>215.920.160,00</i>
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	%	75	<i>104.453.100,00</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	97.130.040,00
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan	1	7.323.060,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	%	75	<i>9.239.580,00</i>
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	9.239.580,00
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	%	75	<i>14.317.180,00</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	1	7.239.580,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	dokumen	1	7.077.600,00

	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	%	75	<i>12.883.500,00</i>
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	6.383.500,00
	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	6.500.000,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	%	75	<i>68.526.800,00</i>
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	6	34.401.800,00
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	34.125.000,00
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	%	50	<i>6.500.000,00</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1	6.500.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	%	85	<i>6.144.242.750,00</i>
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	%	85	<i>5.754.697.650,00</i>
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2	5.040.705.250,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	21	713.992.400,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	%	85	<i>389.545.100,00</i>
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	3	389.545.100,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	%	100	<i>300.876.950,00</i>

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	%	75	<i>6.371.500,00</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	6.371.500,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	%	100	<i>241.741.650,00</i>
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	41.916.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	52	31.790.350,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	168.035.300,00
	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	Laporan	5	<i>52.763.800,00</i>
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	3	52.763.800,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	%	90	<i>92.500.000,00</i>
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	%	90	<i>92.500.000,00</i>
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	15	53.500.000,00
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	6	39.000.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera	%	100	<i>168.802.000,00</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera	%	100	<i>168.802.000,00</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	20000	113.750.000,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	55.052.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	%	80	<i>332.215.550,00</i>

	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	%	80	332.215.550,00
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	30	291.215.550,00
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	20	41.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				13.342.949.481
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	Indeks	77,78	10.962.242.681,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	14	82.200.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	53.700.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	28.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	%	100	6.709.038.681,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	6.702.038.681,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	7.000.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	26	200.324.700,00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	180.324.700,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	24	20.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	orang	64	66.750.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	24.500.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	42.250.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	97	415.722.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.500.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	117.858.350,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.875.000,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.913.650,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	20.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	58.875.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	136.700.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60	3.297.507.300,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	287.882.300,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	28.125.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.990.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	7	190.700.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	65.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	60.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	65.700.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	%	90	2.112.617.400,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	%	90	2.112.617.400,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	101.970.200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	5	728.352.750,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	1.204.753.700,00
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	48.000.000,00
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		Dokumen	4	29.540.750,00
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	%	90	73.514.750,00

	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	%	90	73.514.750,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	39.500.000,00
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	34.014.750,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	%	90	194.574.650,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	%	90	194.574.650,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	141.365.650,00
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	53.209.000,00

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal sebelas bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	1	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7.16
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	0.20
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Perindustrian dan Perdagangan	3.1	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	84,79
		3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perindustrian dan Perdagangan	Skor	79,9

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

D. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah		PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	2,637,306,77	
			PDRB sector Industri	Juta Rupiah	962.770,45	
		1.1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase	7,16	
		1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase	0,201	
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	Angka	84,79
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	79,9	

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian rencana kerja perubahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.:

Tabel 2.13
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.023.549.418
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	%	75	<i>162.508.350,00</i>
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	%	75	<i>94.285.300,00</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	89.982.000,00
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan	1	4.303.300,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	%	75	<i>5.275.000,00</i>
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	5.275.000,00
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	%	75	<i>7.429.600,00</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	1	3.550.100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	dokumen	1	3.879.500,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	2				
1					
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	%	75	4.261.500,00
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	2.167.300,00
	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	2.094.200,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	%	75	48.026.150,00
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	6	26.325.400,00
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	21.700.750,00
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal	%	50	3.230.800,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1	3.230.800,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	%	85	6.719.349.701,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	%	85	6.350.152.201,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2	5.529.545.701,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	21	820.606.500,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	%	85	369.197.500,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	3	369.197.500,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	1				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	%	100	<i>309.724.250,00</i>
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	%	75	<i>2.858.800,00</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	2.858.800,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	%	100	<i>257.601.650,00</i>
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	30.516.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	52	17.190.350,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	209.895.300,00
	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	Laporan	5	<i>49.263.800,00</i>
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	3	49.263.800,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	%	90	<i>91.019.500,00</i>
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	%	90	<i>91.019.500,00</i>
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	15	71.699.500,00
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	6	19.320.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	%	100	<i>106.881.850,00</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	%	100	<i>106.881.850,00</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	20000	81.829.850,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	2				
1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	25.052.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	%	80	296.317.300,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	%	80	296.317.300,00
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	30	270.434.600,00
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	20	25.882.700,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	%	90	2.342.302.360,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	%	90	2.342.302.360,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	85.511.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	5	1.095.811.510,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	1.098.698.250,00
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	42.000.000,00
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		Dokumen	4	20.281.600,00
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	%	90	48.260.200,00
	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	%	90	48.260.200,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	1				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	29.934.750,00
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	18.325.450,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	%	90	152.950.250,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	%	90	152.950.250,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	103.950.250,00
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	49.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	Indeks	77,78	10.794.235.657,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	14	70.550.750,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.858.250,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	24.692.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	%	100	6.629.173.557,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	6.624.452.107,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	4.721.450,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	26	189.166.750,00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	173.619.950,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	24	15.546.800,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	orang	64	49.617.850,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	9.477.300,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	40.140.550,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	97	334.947.950,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.500.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	137.523.750,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.875.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.660.450,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	13.806.700,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	58.875.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	56.707.050,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60	3.347.601.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	304.680.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.025.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.017.896.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	7	173.177.800,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
	1				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	67.960.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	40.400.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	64.817.800,00

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat daerah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal sebelas bulan November tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	1 Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7.16
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2 Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	0.20
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan	3.1 Nilai SAKIP Dinas dan Perdagangan	Angka	84,79

Publik Perindustrian Perdagangan	Dinas dan	3. 2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Skor	79,9
--	--------------	---------	--	------	------

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025

Pada tahun 2025 tidak terjadi perubahan kebijakan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja (Induk) dan Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja (Induk) tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16	7,16	100,00	Berhasil
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,2	0,11	55	Cukup Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,79	85,2	100,48	Berhasil
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79,9	84,3	105,51	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16	7,16	100,00	Berhasil
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,2	0,11	55	Cukup Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,79	85,2	100,48	Berhasil
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79,9	84,3	105,51	Sangat Berhasil

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan						
	Indikator Kinerja Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan						
1.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien						
	Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan sarana distribusi	6.719.349.701	6.594.183.709	98,14	85	85	100,00
1.1.1.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan sarana distribusi	6.350.152.201	6.230.984.498	98,12	85	85	100,00
1.1.1.1	Rincian Output (RO) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.529.545.701	5.410.660.680	97,85	2	2	100,00
1.1.1.2	Rincian Output (RO) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	820.606.500	820.323.818	99,97	21	21	100,00
1.1.2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan						

	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	369.197.500	363.199.211	98,38	85	83,56	98,31
1.1.2.1	Rincian Output (RO) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	369.197.500	363.199.211	98,38	1	1	100,0 0
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
	Sasaran Program Nilai Ekspor Barang						
	Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Pameran	91.019.500	90.395.794	99,31	90	90	100,0 0
1.2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya pertumbuhan potensi ekspor daerah						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan sarana distribusi	91.019.500	90.395.794	99,31	85	85	100,0 0
1.2.1.1	Rincian Output (RO) Pameran Dagang Lokal	71.699.500	71.094.000	99,16	15	10	66,67
1.2.1.2	Rincian Output (RO) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	19.320.000	19.301.794	99,91	6	6	100,0 0
1.3	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
	Sasaran Program Meningkat nya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						
	Indikator Kinerja Program Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	296.317.300	170.119.942	57,41	80	80	100,0 0
1.3.1.	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya promosi produk dalam negeri						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	296.317.300	170.119.942	57,41	80	80	100,0 0

1.3.1.1	Rincian Output (RO) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	270.434.600	145.035.230	53,63	30	41	136,67
1.3.1.2	Rincian Output (RO) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25.882.700	25.084.712	96,92	20	40	200,00
2.	Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah						
	Indikator Kinerja Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah						
2.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
	Sasaran Program Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri						
	Indikator Kinerja Program Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	2.342.302.360	2.191.908.047	93,58	90	90	100,00
2.1.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan Terfasilitasinya IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan SDM serta Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	2.342.302.360	2.191.908.047	93,58	90	90	100,00
2.1.1.1	Rincian Output Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	85.511.000	82.077.000	95,98	2	2	100,00
2.1.1.2	Rincian Output Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.095.811.510	967.516.418	88,29	5	5	100,00
2.1.1.3	Rincian Output Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.098.698.250	1.083.823.829	98,65	5	7	140,00

2.1.1.4	Rincian Output Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	42.000.000	39.286.500	93,54	1	2	200,00
2.1.1.5	Rincian Output Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	20.281.600	19.204.300	94,69	4	6	150,00
2.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
	Sasaran Program Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						
	Indikator Kinerja Program Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	48.260.200	44.011.859	91,20	90	90	100,00
2.2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	48.260.200	44.011.859	91,20	90	90	100,00
2.2.1.1	Rincian Output Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	29.934.750	27.530.100	91,97	1	2	200,00
2.2.1.2	Rincian Output Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	18.325.450	16.481.759	89,94	1	2	200,00
2.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						

	Sasaran Program Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						
	Indikator Kinerja Program Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	152.950.250	151.853.530	99,28	90	90	100,00
2.3.1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Data Industri						
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	152.950.250	151.853.530	99,28	90	90	100,00
2.3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	103.950.250	151.853.530	146,08	1	2	200,00
2.3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	49.000.000	48.657.100	99,30	1	1	100,00

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pelataran	110.000.000,00	129.375.000,00	117,61
2	Retribusi Kios	3.176.143.600,00	3.397.262.000,00	106,96
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	13.856.400,00	14.078.000,00	101,60
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.035.000.000,00	1.087.116.000,00	105,04

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

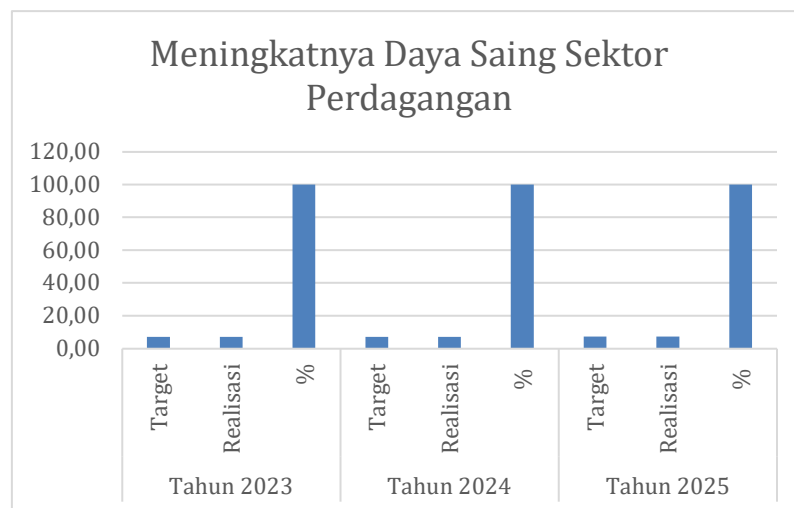
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,15	7,15	100,00	7,15	7,15	100,00	7,16	7,16	100,00
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,20	0,20	100,00	0,20	0,20	100,00	0,202	0,11	55
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,76	84,78	100,02	84,78	84,78	100,00	84,8	85,2	100,47
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	75,00	72,62	96,83	79,75	79,50	99,69	80	84,3	105,38

Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

Grafik 3.5.1

Capaian Realisasi Sasaran 1



Realisasi Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja prosentase pertumbuhan usaha perdagangan tahun 2025 sebesar 7,16% dengan capaian kinerja sebesar 7,16%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } n - (n - 1)}{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } (n - 1)} \times 100 \\ &= \frac{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } 2025 - (2024)}{\text{Jumlah usaha perdagangan Th } (2024)} \times 100\% \\ &= \frac{8586 - 8012}{8012} \times 100\% \\ &= \frac{574}{8012} \times 100\% \\ &= 7,16 \end{aligned}$$

Indikator kinerja prosentase pertumbuhan usaha perdagangan di dukung oleh

3. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,
4. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri,
5. Program pengembangan ekspor.

Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2025 sudah mencapai target yaitu sebesar 7,16, dengan adanya program belanja via e-katalog dan beralihnya cara beli masyarakat melalui digital marketing secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran pengusaha perdagangan untuk memproses legalitas usahanya. Selain pendampingan strategi yang kita ambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dengan pelatihan Digital Marketing, diberikan bantuan peralatan sarana perdagangan serta dilakukan pendampingan agar meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan bertransaksi digital. Proses rehabilitasi pasar daerah juga terus dilakukan agar pembeli dan pedagang merasa nyaman, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

Grafik 3.5.2

Capaian Realisasi Sasaran 2



Realisasi Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah dengan indikator kinerja prosentase pertumbuhan industri kecil menengah tahun 2025 sebesar 0,202% dengan capaian kinerja sebesar 54,46%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah industri Th } n - (n - 1)}{\text{Jumlah industri Th } (n - 1)} \times 100 \\ &= \frac{\text{Jumlah industri Th } 2025 - (2024)}{\text{Jumlah industri Th } (2024)} \times 100 \\ &= \frac{13.535 - 13.520}{13520} \times 100 \\ &= \frac{15}{13520} \times 100 \\ &= 0,11 \end{aligned}$$

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) , Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan IKM di Kabupaten Magetan. Dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

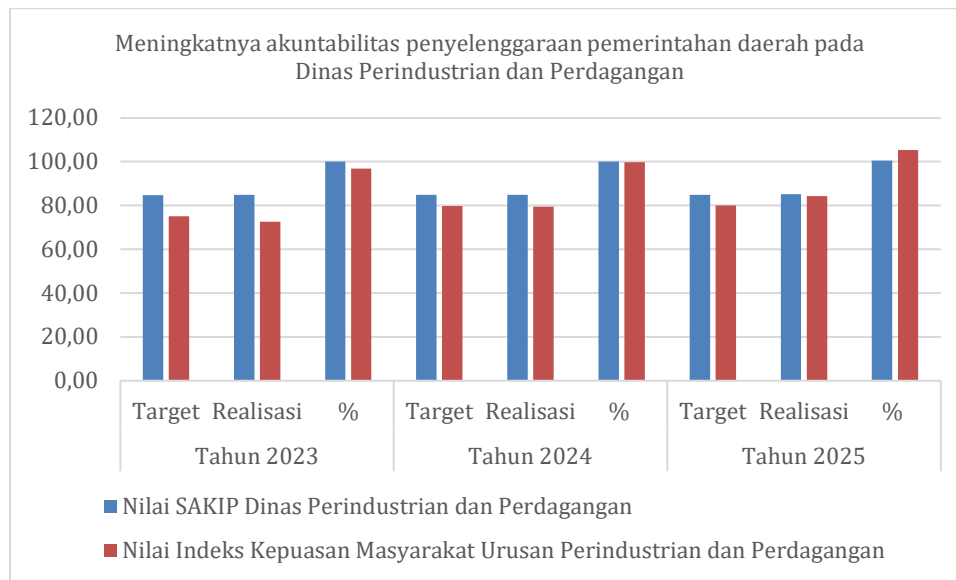
Pertumbuhan Industri Kecil Menengah untuk tahun 2025 tidak mencapai target, dikarenakan :

1. SDM yang kurang / tidak ada regenerasi
2. Persaingan dengan industri yang lebih besar dan produk dari luar negeri
3. Kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional
4. Terbatasnya akses pasar dan distribusi hasil produksi
5. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital dan pemasaran daring/online

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan industri tersebut adalah mengadakan kegiatan pelatihan – pelatihan bagi IKM untuk menambah wawasan dan nilai jual produk, Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi IKM untuk menunjang proses produksi, memberikan pelatihan dan pendampingan digital marketing salah satunya pendampingan pendaftaran e-katalog dan pendaftaran SIINas.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Grafik 3.5.3
Capaian Realisasi Sasaran 3



Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mencapai 85,2 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila

dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,42. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 mencapai 84,3 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan grafik, apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka dapat terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 4,8. Kenaikan tersebut dikarenakan telah meningkatnya kualitas layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16	7,17	99,86
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,11	0,202	54,46
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85,2	84,8	100,47
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	84,3	80	105,38

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dari 3 indikator kinerja, yang sudah mencapai target akhir Renstra adalah Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan tingkat kemajuan 100,47% dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan tingkat kemajuan 105,38%.

4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain (Bila Ada)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	NIHIL				

5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.8
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16	7,16	100,00	Berhasil Sesuai Target
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,2	0,11	55	Cukup Berhasil
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,79	85,2	100,48	Berhasil Sesuai Target
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79,9	84,3	105,51	Berhasil Sesuai Target

Uraian penjelasan tabel penyebab kegagalan capaian kinerja tahun 2025,:

1. SDM yang kurang / tidak ada regenerasi pelaku IKM
2. Persaingan dengan industri yang lebih besar dan produk dari luar negeri
3. Kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional
4. Terbatasnya akses pasar dan distribusi hasil produksi
5. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital dan pemasaran daring/online

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	Pendataan jumlah usaha perdagangan	Melakukan pendataan jumlah usaha perdagangan, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima
Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pendataan jumlah Industri Kecil Menengah	Melakukan jumlah Industri Kecil Menengah dan pendampingan legalitas usaha dan SIINas
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyusun kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target, yang dituangkan dalam rencana aksi berupa langkah-langkah nyata yang harus diambil dan dapat dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut (Rencana Aksi).	Akan dilakukan pembahasan dan penyusunan kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target, yang dituangkan dalam rencana aksi

	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Terkait tidak tercapainya target indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi atas hambatan nyata dalam pencapaian indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan" (Hasil identifikasi permasalahan); • Melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan stakeholder terkait untuk penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan) penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan). 	<p>Dilakukan identifikasi atas hambatan nyata dalam pencapaian indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan stakeholder terkait untuk penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan) penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan).
--	--	---	---

6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada table berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan (PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN)	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaranxcapaian output/kinerja)	(Pagu anggaranxcapaian output/kinerja)-Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah									
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.685.800.951	7.527.953.714	7,16	7,16	1,0000	7.685.800.951,00	157.847.237,00	2,05%
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2.543.512.810	2.387.773.436	0,20	0,11	0,5473	1.391.972.184,58	- 995.801.251,42	-71,54%
Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	10.220.503.107	9.613.288.331	84,79	85,20	1,0048	10.269.924.103,27	656.635.772,27	6,39%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	573.732.550	551.086.775	79,90	84,30	1,0551	605.327.333,73	54.240.558,73	8,96%
		21.023.549.418	20.080.102.256				19.953.024.572,58	(127.077.683,42)	-54,13%

Secara keseluruhan, nilai efisiensi yang diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai sasaran strategi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Nilai efisiensi paling tinggi sebesar 8,96% pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat, sedangkan nilai efisiensi paling rendah dari sasaran Pertumbuhan Industri Kecil Mengah dengan nilai -71,54% hal ini disebabkan nilai realisasi kinerja hanya tercapai 0,5% dari target 0,201%.

Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Pagu anggaran (perubahan terakhir) Rp	Realisasi Anggaran Rp	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Output/kinerja	(Pagu anggaranxcapaian output/kinerja)	(Pagu anggaranxcapaian output/kinerja)-Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	162.508.350	157.941.150	75	95	1,2611	204.933.863,24	46.992.713,24	22,93%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin	94.285.300	94.098.500	75	97	1,2939	121.992.606,83	27.894.106,83	22,87%
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	5.275.000	4.868.500	75	92	1,2305	6.491.063,33	1.622.563,33	25,00%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	7.429.600	6.876.850	75	93	1,2341	9.169.117,01	2.292.267,01	25,00%

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha terintegrasi secara elektronik	4.261.500	4.258.000	75	100	1,3323	5.677.454,40	1.419.454,40	25,00%
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	48.026.150	44.631.500	75	91	1,2139	58.297.342,61	13.665.842,61	23,44%
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase jumlah penerbitan Surat Jeterangan Asal	3.230.800	3.207.800	50	81	1,6116	5.206.757,28	1.998.957,28	38,39%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	6.719.349.701	6.594.183.709	85	123	1,4475	9.726.456.320,13	3.132.272.611,13	32,20%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	6.350.152.201	6.230.984.498	85	125	1,4667	9.313.805.587,04	3.082.821.089,04	33,10%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	369.197.500	363.199.211	85	98	1,1552	426.488.265,00	63.289.054,00	14,84%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	309.724.250	290.905.560	100	92	0,9214	285.379.923,95	-5.525.636,05	-1,94%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota	2.858.800	2.855.300	75	74	0,9865	2.820.301,49	-34.998,51	-1,24%

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	257.601.650	247.538.160	100	95	0,9462	243.742.681,23	- 3.795.478,77	-1,56%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	49.263.800	40.512.100	5	81	16,1200	794.132.456,00	753.620.356,00	94,90%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaksanaan Pameran	91.019.500	90.395.794	90	142	1,5812	143.922.056,06	53.526.262,06	37,19%
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pameran	91.019.500	90.395.794	90	142	1,5812	143.922.056,06	53.526.262,06	37,19%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera	106.881.850	105.091.560	100	97	0,9741	104.113.610,09	- 977.949,92	-0,94%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera	106.881.850	105.091.560	100	97	0,9741	104.113.610,09	- 977.949,92	-0,94%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	296.317.300	289.435.941	80	98	1,2210	361.803.423,30	72.367.482,30	20,00%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	296.317.300	289.435.941	80	98	1,2210	361.803.423,30	72.367.482,30	20,00%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	2.342.302.360	2.191.908.047	90	110	1,2197	2.856.828.111,75	664.920.064,75	23,27%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri agro dan pelaku usaha industri non agro	2.342.302.360	2.191.908.047	90	110	1,2197	2.856.828.111,75	664.920.064,75	23,27%

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	48.260.200	44.011.859	90	85	0,9448	45.595.164,51	1.583.305,51	3,47%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan dan perizinan	48.260.200	44.011.859	90	85	0,9448	45.595.164,51	1.583.305,51	3,47%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	152.950.250	151.853.530	90	87	0,9644	147.512.018,89	- 4.341.511,11	-2,94%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	152.950.250	151.853.530	90	87	0,9644	147.512.018,89	- 4.341.511,11	-2,94%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	10.794.235.657	10.164.375.106	78	94	1,2058	13.016.088.483,80	2.851.713.377,80	21,91%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	70.550.750	69.799.841	14	95	6,8136	480.702.574,46	410.902.733,46	85,48%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	6.629.173.557	6.173.371.874	100	92	0,9205	6.102.154.259,22	- 71.217.614,78	-1,17%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	189.166.750	188.433.232	26	99	3,7942	717.742.303,37	529.309.071,37	73,75%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	49.617.850	42.082.360	64	71	1,1122	55.184.352,55	13.101.992,55	23,74%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.947.950	320.571.183	97	101	1,0368	347.275.415,79	26.704.232,79	7,69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.347.601.000	3.206.508.625	60	97	1,6207	5.425.345.354,00	2.218.836.729,00	40,90%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	173.177.800	163.607.991	7	86	12,2714	2.125.139.002,86	1.961.531.011,86	92,30%

B. INOVASI TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Adalah “Pas Mesem” yaitu Pasar Sadar dan Melek Metrologi.

Pas Mesem atau Pasar Sadar dan Melek Metrologi adalah suatu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Magetan dalam meningkatkan citra pasar tradisional dengan cara membuat pos ukur ulang yang dapat digunakan oleh konsumen atau pengunjung pasar dalam menakar ulang barang belanjannya. Serta memberikan pelayanan tera atau tera ulang dan reparasi terhadap UTTP yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pedagang, pengguna, dan pemilik UTTP serta pengelola pasar tentang pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan metrology untuk melindungi hak – hak konsumen. Pasar Tertib Ukur di Pasar Kabupaten Magetan diharapkan dapat melindungi konsumen dan mendorong persaingan bisnis yang sehat. Sehingga dapat terwujudnya pasar tradisional yang tertib dalam pengukuran.



Gambar. 3.1 Foto Pos Ukur Di Pasar Daerah

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Selama Tahun 2025, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan antara lain:

1. Mendapatkan prestasi sebagai juara pertama Duta KORPRI Magetan yang diberikan oleh Bupati Magetan atas nama Agus Haryanto, SE, M.SM dalam rangka memperingati HUT ke-54 KORPRI. Inovasi yang diangkat adalah pemanfaatan website dalam memberikan pelayanan bagi para pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Magetan.



Gambar. 3.2 Foto Piagam Penghargaan Duta Korpri Tahun 2025



Gambar. 3.3 Foto Penyerahan Piagam Penghargaan Duta Korpri Tahun 2025 oleh Bupati Magetan

2. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Pada Pasar Parang Kabupaten Magetan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



Gambar. 3.4 Foto Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur

3. Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengikuti Lomba Inovasi Daerah. Pada kesempatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai Penerima Penghargaan Inoda Award 2025 terbaik III dengan inovasi PAS MASEM (Pasar Sadar dan Melek Metrologi). Melalui lomba Inovasi Daerah diharapkan dapat mendorong perangkat daerah/instansi penyelenggara layanan publik menciptakan solusi berkelanjutan guna menghadapi tantangan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap penyelenggara pemerintahan dituntut untuk terus meningkatkan

tata kelola dan layanan publik melalui berbagai inovasi agar mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tantangan jaman.



Gambar. 3.5 Foto Proses Penilaian Tim Inoda Award 2025



Gambar. 3.4 Foto Piagam Penghargaan Inoda Award Tahun 2025 Terbaik III

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu (1) tujuan, tiga (3) sasaran dengan menggunakan empat (4) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari empat (4) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Perdagangan

- Sasaran ke-1 terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak tiga koma enam belas (3,16) indikator kinerja telah mencapai target. Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh enam (6) Program yang terdiri dari 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)

- Sasaran ke-1 didukung oleh empat belas (14) Kegiatan terdiri dari empat belas (14) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah

- Sasaran ke-2 terdiri dari satu (1) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 55% (kategori cukup berhasil);
- Sebanyak satu (1) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak nol koma sebelas (0,11) indikator kinerja belum mencapai target. Seluruh indikator kinerja tidak mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh tiga (3) Program yang terdiri dari sembilan (9) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 55% (kategori cukup berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh tiga (3) Kegiatan terdiri dari tiga (3) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 55% (kategori tidak berhasil)

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Sasaran ke-3 terdiri dari dua (2) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,48% dan 105,51 % (kategori berhasil);
- Sebanyak dua (2) indikator kinerja telah mencapai target yaitu sebanyak delapan puluh lima koma dua (85,2) dan delapan puluh empat koma tiga (84,3) Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 didukung oleh satu (1) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-3 didukung oleh tujuh (7) Kegiatan terdiri dari tujuh (7) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100. % (kategori berhasil)

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja % (%)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16	7,16	100,00
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0,2	0,11	55,00
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,79	85,2	100,48
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79,9	84,3	105,51
Capaian Kinerja				90,25
				BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tiga (3) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 90,25% dengan serapan anggaran sebesar Rp 20.080.102.256,- dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 0,99%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2025 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,92 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah belum tercapainya salah satu indikator kinerja sasaran.

Serapan anggaran tahun 2025 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,51 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah pagu anggaran pada tahun 2025 lebih banyak dari pagu anggaran tahun 2024

B. RENCANA AKSI TAHUN 2026

Atas dasar pencapaian kinerja tahun n tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2026
Tujuan Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah		
Sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	Meningkatkan Kualitas Pasar/Sarana Distribusi Perdagangan
		Tersedianya data harga real dan harga rata-rata per komoditas
		Terlaksananya Pengamanan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Ukur
		Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan promosi potensi ekspor daerah
Sasaran 2. Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan bechmark bagi pelaku industri Agro dan Non Agro
		Hasil Produksi IKM Yang diujikan
		Terlaksananya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri
Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi pada Disperindag
		Meningkatkan kualitas layanan

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	-	-	-	7,17	7,17
Sasaran 2. Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	-	-	-	0,202	0,202
Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP	-	-	-	84,80	84,8
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80,00	80,00

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, 19 Februari 2026


 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGETAN
SUCIPTO, SH., M.Hum
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196607141994031009

LAMPIRAN

A. Matriks Renstra RPD dan RPJMD

B. Indikator Kinerja Utama RPD dan RPJMD

C. Matriks Renja Tahun n dan Perubahannya

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun n dan perubahannya

E. Pengukuran Kinerja

F. Pohon Kinerja

G. Rencana Aksi Tahun n+1

A. Indikator Kinerja Utama RPD 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- INSTANSI** : **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN**
- TUJUAN** : **RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 - 2026**
- TUJUAN 1** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan
- TUJUAN 3** : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

NO.	KINERJA UTAMA/SASARANSTRATE GIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	Bidang Penanggung Jawab
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$	Bidang Bina Perdagangan dan Bidang Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil	$\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Industri Agro dan Bidang Industri Non Agro

B. Indikator Kinerja Utama RPJMD 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

INSTANSI	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
VISI	: MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN
MISI	: MENGEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN, MENDORONG HILIRISASI PRODUK UNGGULAN BERBASIS UMKM, KOPERASI UNTUK MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN.
TUGAS	: MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN BIDANG PERDAGANGAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN
FUNGSI	: 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN BIDANG PERDAGANGAN 2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN BIDANG PERDAGANGAN 3. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN BIDANG PERDAGANGAN 4. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha perdagangan	Persentase Pertumbuhan usaha perdagangan	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional: Jumlah usaha perdagangan adalah banyaknya unit usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang/jasa di suatu wilayah tertentu, baik skala besar maupun kecil, formal maupun informal, dalam kurun waktu tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perdagangan • Bidang Pasar 	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n - 1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional: Jumlah Total Industri adalah jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah yang terdaftar di wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan • Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka 	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja 	Inspektorat Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

	Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	dan Perdagangan	<p>- Bobot 25 komponen evaluasi</p> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 		
--	--	-----------------	--	--	--

			6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p style="text-align: center;">Jumlah Indeks per Parameter</p> <p>Nilai IKM : ----- x 25</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Parameter</p> <p>9 Unsur/parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelavanoan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana 	Laporan hasil IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

C. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jalan Tri Pandita Nomor 17 Magetan Kode pos 63319
 Telepon (0351) 895049 Faximile (0351) 895049
 Email : dinasperindagmgt.magetan.go.id Website : disperindag.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCIPTO, SH, M.Hum
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : NIZHAMUL, S.E, M.M
 Jabatan : Pj. Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

 NIZHAMUL, S.E, M.M

Pihak Pertama,

 SUCIPTO, SH, M.Hum
 Pemimpin Utama Muda (I/1c)
 NIP. 19660714 199403 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7.16 %
2.	Meningkatnya Kegiatan Sektor Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0.201 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,79
		Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	79,9

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 215.920.160,-	-
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 6.144.242.750,-	-
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 300.876.950,-	-
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 92.500.000,-	-
5	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 168.802.000,-	-
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 332.215.550,-	-
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.962.242.681,-	-
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 2.112.617.400,-	-
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 73.514.750,-	-
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 194.574.650,-	-
Jumlah Total Anggaran		Rp. 20.597.506.891,-	

Magetan, 13 Januari 2025

Pi. BUPATI MAGETAN

 NIZHAMUL, S.E, M.M

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

 SUCIPTO, SH, M.Hum
 Pemimpin Utama Muda (I/1c)
 NIP. 19660714 199403 1 009

D. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jalan Tri Pandita Nomor 17 Magetan Kode pos 63319
 Telepon (0351) 895049 Faximilo (0351) 895049
 Email : dinasperindagngt.magetan.go.id Website : disperindag.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCIPTO, SH, M.Hum
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Magetan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd
 Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 30 Juni 2025

Pihak Kedua

 Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

Pihak Pertama,

 SUCIPTO, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660711 199403 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Prosentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,16%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	0 20%
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan	84,79 Angka 79,9 Skor

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 165.008.350,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 6.025.792.701,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	3.30.04 Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 315.724.250,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	Rp. 63.519.500,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	3.30.06 Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 107.881.850,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 296.317.300,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 1.996.737.960,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 51.760.200,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 174.950.250,-	Dana Alokasi Umum (DAU)
10	3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.836.922.231,-	Dana Alokasi Umum (DAU)

Magetan, 30 Juni 2025

BUPATI MAGETAN

 Hj. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.Pd

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN MAGETAN

 SUCIPTO, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660711 199403 1 009

E. Pengukuran Kinerja



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

STAUAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/26.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/29.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/26.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/36.P/403.060/2025 tentang Melaksanakan Perpanjangan SPT Nomor 700/29.P/403.060/2025 Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Kabupaten Magetan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Tripanidita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63391
Telepon (0351) 897113. Laman inspektorat.magetan.go.id, Pos-el inspektorat@magetan.go.id

Nomor : 700/350/403.060/2025
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan
di
MAGETAN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

- C. Tujuan Evaluasi
Secara khusus evaluasi atas implementasi SAKIP bertujuan untuk:
 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- D. Ruang Lingkup Evaluasi
Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan ruang lingkup, meliputi:
 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
 2. Penilaian pengukuran kinerja;
 3. Penilaian pelaporan kinerja;
 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi dan teknik evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut.

1. Metodologi dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan memperimbangan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam evaluasi.
2. Teknik evaluasi atas implementasi SAKIP
 - a) Pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan meminta kelengkapan dokumen SAKIP kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan mengirimkan softcopy ke alamat <https://eji-ksatira.magetan.go.id/> dan pengecekan dokumen yang diunggah melalui <http://esr.menpan.go.id>
 - b) Tim evaluator melakukan evaluasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan Aplikasi Si Kasnia diakses melalui <https://si-ksafnre.magetan.go.id/>
- c) Tim evaluator juga melaksanakan konfirmasi kepada beberapa Perangkat Daerah dalam rangka penajaman evaluasi.

F. Evaluator Internal

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Inspektoral Daerah Kabupaten Magetan.

G. Interval Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan Kategori Predikat untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang sangat dinamis, adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik,

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang etal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
4	B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan 2/unit kerja
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak menasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. HASIL EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			2024	2025
1)	Perencanaan Kinerja	30%	25,13	29,13
2)	Pengukuran Kinerja	30%	26,50	26,00
3)	Pelaporan Kinerja	15%	12,15	12,42
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,00	18,65
Nilai Hasil Evaluasi			84,78	85,20
Kategori			A	A
Interpretasi			Memuaskan	Memuaskan

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mendapatkan nilai **85,20** dengan kategori **A** atau **Memuaskan**. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja
- 1) Dokumen perencanaan belum diupload pada website perangkat daerah;
 - 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik. Dari 4 (empat) indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Pengukuran Kinerja
- Hasil pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang tidak tercapai. Hal ini terlihat dari analisa penyebab kegagalan pencapaian target bahwa penyebab tidak tercapainya nilai IKM karena jumlah responden yang sedikit, namun tidak menyetakan metode survey yang digunakan sehingga dapat diketahui bahwa nilai IKM juga dipengaruhi oleh jumlah responden, bukan hanya

hasil jawaban dari responden. Sehingga diketahui penyebab kegagalannya serta dapat menentukan pengambilan strategi dan kebijakan untuk pencapaian target berikutnya.

c. Pelaporan Kinerja

Dokumen pelaporan telah disusun dengan baik sesuai standar yang ada, namun demikian masih terdapat kesalahan dalam penyajian penghitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase Perubahan Usaha Perdagangan. Sesuai data yang disajikan, seharusnya capaian untuk indikator tersebut adalah 7,17% tetapi dilaporkan 7,19% (sesuai target tahun 2024).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum maksimal. Dari 4 (empat) indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Belum dilakukan analisa penyebab kegagalan terhadap target yang tidak tercapai (nilai IKM). Dalam Laporan Kinerja tahun 2024 tabel 3.6 hanya disebutkan bahwa penyebab kegagalan adalah jumlah responden yang sedikit, namun belum menyebutkan berapa jumlah responden yang diperoleh dan jumlah responden minimal yang seharusnya mengisi survei serta analisa penyebab sedikitnya jumlah responden yang mengisi survei. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan/strategi berikutnya.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Agar mengupload dokumen perencanaan pada website perangkat daerah.

- 2) Terkait tidak tercapainya target indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan":
- Melakukan identifikasi atas hambatan nyata dalam pencapaian indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan" (Hasil identifikasi permasalahan);
 - Melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan stakeholder terkait untuk penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan) penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan).
- b. Pengukuran Kinerja
- Menyusun kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target, yang dituangkan dalam rencana aksi berupa langkah-langkah nyata yang harus diambil dan dapat dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut (Rencana Aksi).
- c. Pelaporan Kinerja
- 1) Melakukan pembahasan dengan bidang terkait dan perbaikan terhadap penghitungan capaian kinerja yang dilaporkan (Berita acara/notulen pembahasan dan revisi Laporan Kinerja);
 - 2) Melakukan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi;
 - 3) Melakukan perbaikan pada pelaporan kinerja dan penyesuaian analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta strategi dan kebijakannya.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan maksimal dalam rangka mendukung efektifitas, efisiensi, peningkatan dan pencapaian kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD);
 - 2) Melakukan pembahasan dengan bidang terkait untuk menentukan langkah-langkah nyata kebijakan/strategi untuk pencapaian target yang dituangkan dalam Rencana Aksi.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengimplementasikan SAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP kedepannya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



F. Rencana Tindak Lanjut LHE



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Tri Pandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319
Telepon. (0351) 895049 Email : dinasperindagmt@gmail.com website: disperindag.magetan.go.id

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL OPD TAHUN 2025

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	CATATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	BUKTI DUKUNG (Upload pada Link)	HAMBATAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan Kinerja Dokumen perencanaan belum diupload pada website perangkat daerah;	Agar mengupload dokumen perencanaan pada website perangkat daerah.	Dokumen perencanaan akan diupload di website perangkat daerah	Dokumen perencanaan telah diupload pada website perangkat daerah			
	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik. Dari 4 (empat) indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan.	Terkait tidak tercapainya target indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan": • Melakukan identifikasi atas hambatan nyata dalam pencapaian indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan" (Hasil Identifikasi permasalahan); • Melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan stakeholder terkait untuk penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan) penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan).	• Dilakukan identifikasi atas hambatan nyata dalam pencapaian indikator sasaran "Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan" • Dilakukan pembahasan dengan seluruh pegawai dan stakeholder terkait untuk penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan) penentuan target berikutnya (Berita Acara/Notulen rapat pembahasan).	Telah dilakukan identifikasi dari hambatan dan pembahasan solusinya di rapat staf dinas			
2	Pengukuran Kinerja						

<p>Hasil pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja yang tidak tercapai. Hal ini terlihat dari analisa penyebab kegagalan pencapaian target bahwa penyebab tidak tercapainya nilai IKM karena jumlah responden yang sedikit, namun tidak menjelaskan metode survey yang digunakan sehingga dapat diketahui bahwa nilai IKM juga dipengaruhi oleh jumlah responden, bukan hanya hasil jawaban dari responden. Sehingga diketahui penyebab gagalnya serta dapat menentukan pengambilan strategi dan kebijakan untuk pencapaian target berikutnya.</p>	<p>Menyusun kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target, yang dituangkan dalam rencana aksi berupa langkah-langkah nyata yang harus diambil dan dapat dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut (Rencana Aksi).</p>	<p>Akan dilakukan pembahasan dan penyusunan kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target, yang dituangkan dalam rencana aksi</p>	<p>Telah dilakukan rapat pembahasan dan penyusunan kebijakan dan strategi dalam upaya pencapaian target</p>		
https://bit.ly/BuktiDukung-RTLAKIPOPD-2025					
<p>3 Laporan Kinerja</p> <p>Dokumen pelaporan telah disusun dengan baik sesuai standar yang ada, namun demikian masih terdapat kesalahan dalam penyajian penghitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan. Sesuai data yang disajikan, seharusnya capaian untuk indikator tersebut adalah 7,17% tetapi dilaporkan 7,15% (sesuai target tahun 2024).</p>	<p>1) Melakukan pembahasan dengan bidang terkait dan perbaikan terhadap penghitungan capaian kinerja yang dilaporkan (Berita acara/notulen pembahasan dan revisi Laporan Kinerja); 2) Melakukan penyesuaian aktivitas dalam pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi; 3) Melakukan perbaikan pada pelaporan kinerja dan penyesuaian analisa keberhasilan/gagalan pencapaian kinerja serta strategi dan kebijakannya.</p>	<p>Akan dilakukan pembahasan dan pencermatan terkait Laporan Kinerja</p>	<p>Telah dilakukan pembahasan dan pencermatan terkait Laporan Kinerja, bahwa hasil capaian kinerja pada tahun 2024 adalah benar 7,15% sedangkan target senilai 7,17% merupakan target pada akhir periode Renstra yaitu Tahun 2026</p>		
<p>4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>					



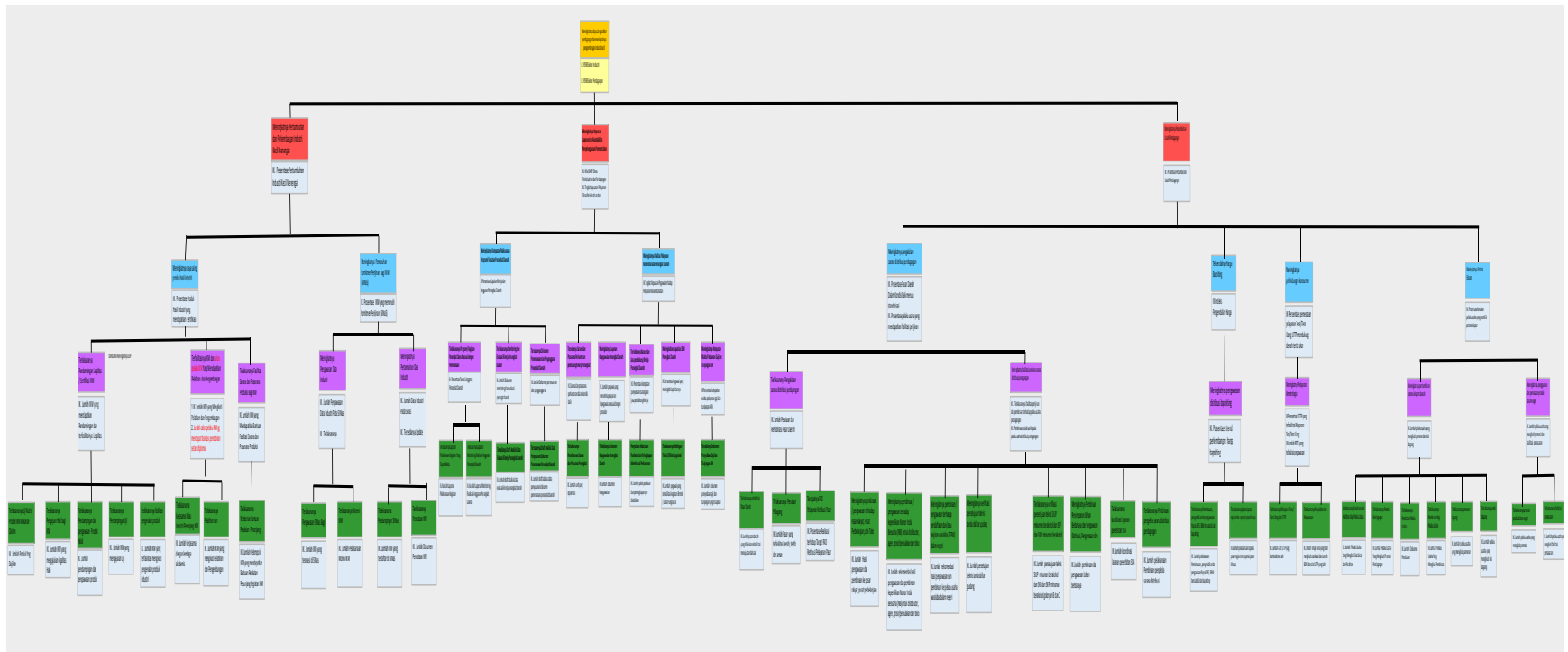
<p>Terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal namun belum maksimal. Dari 4 (empat) indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, terdapat 1 (satu) indikator yang targetnya tidak tercapai, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat urusan Perindustrian dan Perdagangan;</p>	<p>Meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan maksimal dalam rangka mendukung efektifitas, efisiensi, peningkatan dan pencapaian kinerja (Surat Komitmen Kepala OPD).</p>	<p>Akan disusun Surat Komitmen Kepala OPD untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan maksimal dalam rangka mendukung efektifitas, efisiensi, peningkatan dan pencapaian kinerja</p>	<p>Telah disusun Surat Komitmen Kepala OPD</p>		
<p>Belum dilakukan analisa penyebab kegagalan terhadap target yang tidak tercapai (nilai IKM). Dalam Laporan Kinerja tahun 2024 tabel 3.6 hanya disebutkan bahwa penyebab kegagalan adalah jumlah responden yang sedikit, namun belum menyebutkan berapa jumlah responden yang diperoleh dan jumlah responden minimal yang seharusnya mengisi survei serta analisa penyebab sedikitnya jumlah responden yang mengisi survei. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan/strategi berikutnya.</p>	<p>Melakukan pembahasan dengan bidang terkait untuk menentukan langkah-langkah nyata kebijakan/strategi untuk pencapaian target yang dituangkan dalam Rencana Aksi.</p>	<p>Akan dilakukan pembahasan dengan bidang terkait untuk menentukan langkah-langkah nyata kebijakan/strategi untuk pencapaian target yang dituangkan dalam Rencana Aksi</p>	<p>Telah dilakukan pembahasan dengan bidang</p>		

Magetan, 14 Juli 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perdagangan
Kabupaten Magetan
Wahyuni, S.P., M.Hum
Gedung Pemuda Muda
Telp. 19660 (41) 84031009



G. Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029



https://si-ksatria.magetan.go.id/view-pohon-kinerja-opddinas-perindustrian-dan-perdagangan/?key_sakip=MTc3MTA1NTg5MzAwMDM0YzZjNDdmYzNlMGEE0ZmY1NzhlOTk1ZDg5Y2IzNTk4MTE3MTA1NTg5MzAwMA==&id_skpd=2241&id=17979&id_jadwal=16

16